



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI DAMPAK MUSIM KEMARAU TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

Rahmi Yuningsih

Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan 56% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak awal Juli 2023. Hingga kini, sekitar 78,5% dari total zona musim telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan September 2023. Sementara itu, musim hujan diprediksi akan terjadi lebih lambat dari biasanya. Sekalipun sebagian wilayah sudah mengalami hujan, sebagian besar wilayah baru akan memasuki musim hujan pada November 2023.

Musim kemarau berkepanjangan ini telah menimbulkan dampak pada masalah polusi udara. Berdasarkan data *Air Quality Index* (AQI), pada 10 September 2023, kota dengan kualitas udara tercemar antara lain Depok (170), Tangerang Selatan (166), Bandung (160), Cikarang (156), Jakarta (154), dan Serpong (153). Salah satu dampak dari kualitas udara yang tercemar adalah penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Pada 28 Agustus 2023, Kementerian Kesehatan merilis kasus ISPA di Jabodetabek hingga pertengahan tahun 2023 dengan jumlah rata-rata 100.000 kasus per bulan. Namun pada Agustus 2023, terdata melonjak dua kali lipat yaitu 200.000 kasus.

Selain polusi udara, musim kemarau juga berdampak pada masalah krisis air bersih di sejumlah daerah. Setidaknya 27 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 15 kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Terbatasnya air bersih menjadikan virus dan bakteri terkonsentrasi dalam air tersebut. Jika dikonsumsi, maka dapat meningkatkan risiko timbulnya diare. Di Sukabumi tercatat 5.757 kasus diare pada periode Januari hingga Juli 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.214 di antaranya adalah anak balita. Di Semarang, terdapat 8.616 orang terkena diare. Sedangkan di Papua Tengah, terdapat enam orang meninggal dunia karena diare.

Berdasarkan uraian di atas, penyakit ISPA dan diare perlu ditanggulangi dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Upaya tersebut bertujuan mengurangi risiko penularan dan menurunkan angka morbiditas. Beberapa upaya tersebut tercermin dalam kegiatan promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, dan pemberian vaksin. Pada dasarnya, kegiatan promosi kesehatan tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas melainkan bekerja sama dengan pemuka masyarakat setempat.

Pemuka masyarakat memilih kader kesehatan untuk menjangkau seluruh masyarakat dengan berbagai tatanannya. Dengan demikian, pelatihan kepada kader kesehatan mengenai ISPA dan diare perlu menjadi prioritas. Keterlibatan kader dan pemuka masyarakat diperlukan untuk mengenali kondisi kesehatan masyarakat, menelusuri penyebab, dan mencari alternatif solusi.

Melalui upaya pengorganisasian masyarakat tersebut, pada dasarnya proses pemberdayaan masyarakat telah berjalan. Sedangkan upaya penyehatan lingkungan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas untuk memeriksa air bersih dan sanitasi dasar di masyarakat. Upaya tersebut juga termasuk menyediakan air bersih yang bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Upaya preventif lainnya dilakukan dengan pemberian vaksin rotavirus secara gratis untuk bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan. Hal ini dilakukan mengingat penyebab utama diare pada bayi dan anak adalah rotavirus.

Atensi DPR

Dalam penanggulangan penyakit, upaya promotif dan preventif seringkali belum diutamakan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Termasuk juga penguatan sumber daya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu:

1. meminta kejelasan dari Kementerian Kesehatan terkait penguatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas beserta sumber daya yang diperlukan;
2. meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait penguatan peran dan fungsi Puskesmas dalam mengorganisasikan dan memberdayakan masyarakat; dan
3. melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan organisasi profesi kesehatan dan asosiasi dinas kesehatan terkait penguatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas.

Sumber

iqair.com, 10 September 2023;
Kompas, 29 Agustus 2023; 9 September 2023;
liputan6.com, 2 Agustus 2023;
metrotvnews, 2 September 2023;
republika.co.id, 2, 21, 22 Agustus 2023, & 9 September 2023; dan
sindonews.com, 2 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.